

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Benu, Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

##### **B. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban dan hibah yang bersumber dari APBD sehingga dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

##### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan kepala Lurah Benu, dan data sekunder adalah data dokumen rencana dan realisasi anggaran dana hibah tahun 2014-2015.

##### **D. Teknik Pengumpulan data**

Data primer akan di kumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Lurah Kelurahan Benu, sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan Data sekunder di peroleh melalui penelusuran langsung di Kelurahan Benu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, terkait data-data yang berhubungan dengan penggunaan dana Desa.

## **E. Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

Dalam teknik analisis data juga selain teknik di atas peneliti juga menggunakan 3 tahapan analisis yaitu :

### **1. Evaluasi terhadap kebijakan penyaluran dana desa.**

Yang dimaksudkan dengan evaluasi terhadap kebijakan penyaluran dana desa disini adalah evaluasi terhadap tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa oleh kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dilakukan untuk mengetahui realisasi penggunaan dana desa telah tepat sasaran.

Adapun berikut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dana Desa:

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- c. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- d. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan kewenangan local berskala Desa
- e. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa
- f. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.3 tahun 2015 tentang pendampingan Desa
- g. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.4 tahun 2015 tentang pendirian,pengurusan,pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik Desa
- h. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa
- i. Peraturan menteri Desa PDT dan Transmigrasi No 6 tahun 2015 organisasi dan tata kelola Kementrian Desa,Pembangunan Daerah dan transmigrasi

- j. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No.21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016

## **2. Evaluasi terhadap tingkat akuntabilitas penggunaan Dana Desa.**

Evaluasi guna memastikan penggunaan dana desa telah bertahap dan melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsive dan transparansi guna pertanggung jawaban dan pembelajaran terhadap masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa dan juga guna memastikan telah berdasarkan indikator-indikator Akuntabilitas menurut peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## **3. Evaluasi terhadap tingkat transparansi penggunaan dana desa.**

Evaluasi guna menjamin bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa dikatakan transparan apabila menganut prinsip keterbukaan yang memungkinkan untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dan juga guna memastikan telah sesuai dengan indikator-indikator Transparansi sebagai berikut:

Krina (2003:17) Indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur biaya-biaya dan tanggung jawab
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
4. Meningkatkan arus Informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

